

# **PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA STUDI DI DESA WARI DAN WARI INO KECAMATAN TOBELO**

**ERLAND MOUW<sup>1)</sup> & HERSON KERADJAAN<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup>*FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA, UNIVERSITAS HALMAHERA*  
email: erlandmouw@yahoo.co.id

<sup>2</sup>*FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA, UNIVERSITAS HALMAHERA*  
email: jhk2203@gmail.com

## ***Abstract***

*Service activities against the backdrop of the problems experienced by village Wari and Wari Ino who do not understand the importance of the village administration and does not have competence in administering the village, these issues have an impact on the administration of the village, which until now did not have the book village administration are complete, archival not neat, plus the village office facilities are not adequate. Based on these issues our team of science and technology to the Community (IbM) here to provide solutions so that the objective of this program is to increase the skills of the village in the administrative management of the village in order to realize the orderly administration of the Village Administration Wari and Wari Ino. Activity methods used in this devotion is a lecture and practice, which is implemented in the form of counseling and mentoring. Implementation of activities begins with pemeberian material through lectures and discussions carried out to target service activities, namely apparatus or devices village Wari and Wari Ino, after attending a lecture and discussion are able to understand the importance of knowledge and skills in the correspondence and archival heading towards orderly of Administrative for the village of Wari and Wari Ino. Further activities are carried out simulations of village administration management practices therein do manufacture as well as the arrangement of the village administration was good, filling books village administration. After conducting IbM can be highly beneficial for the village and Wari Wari Ino, so suggestions submitted so that the mentoring activities for the village to be sustainable so that it can provide benefit to the village Wari and Wari Ino governance that has good village.*

**Keywords :** *Management, Device Village, Administration*

## **1. PENDAHULUAN**

Letak Desa Wari dan Wari Ino, Kecamatan Tobelo, relatif dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara. Kendati demikian, dijumpai keadaan di bidang pengelolaan administrasi desa belum tertib dan kurang memadai. Data penduduk tiap bulan dan laporan tahunan semua buku register masih sering terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan. Bahkan tata cara pengisiannya pun belum sempurna. Padahal, jumlah penduduk dapat berubah sewaktu-waktu mengingat banyak penduduk yang tinggal sementara, karena kedua desa sangat dekat dengan Universitas Halmahera.

Berdasarkan hasil pengamatan, penulis melihat bahwa pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan di Desa Wari dan Wari Ino, Kecamatan Tobelo, relatif belum berjalan dengan tertib. Ada indikasi, pengelolaan administrasi belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Padahal administrasi pemerintahan desa merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi kegiatan pemerintah desa yang penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan urusan-urusan desa, perangkat desa berkewajiban melakukan berbagai pencatatan data dan informasi pada buku-buku register desa.

Sesungguhnya proses pencatatan data dan informasi tidak terlalu rumit untuk dilakukan, asal semua perangkat desa, mulai dari tingkat Dusun sampai Sekretaris Desa, memiliki komitmen dan tekun di dalam melakukan pengisian. Setiap desa harus memiliki buku register desa, berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa, yang pada tahun 2016 sudah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yang di dalamnya memuat tentang (1) Administrasi Umum; (2) Administrasi Penduduk; (3) Administrasi Keuangan; (4) Administrasi Pembangunan; dan (5) Administrasi Lainnya

Melihat situasi permasalahan tersebut di atas serta kesepakatan Perangkat Desa Wari dan Wari Ino dengan tim pelaksanaan program IbM, masalah utama yang dihadapi perangkat desa sekarang ini adalah relatif terbatasnya sumber daya perangkat desa. Di samping itu, kurangnya sumber daya pendukung baik itu perangkat lunak dan perangkat keras sehingga menyebabkan tidak tertibnya administrasi di kedua desa tersebut.

Adapun *output* yang menjadi target dalam pengabdian ini adalah:

1. Perangkat Desa Wari dan Wari Ino mempunyai keterampilan dalam mengelola administrasi desa.
2. Tercapainya Perangkat Desa yang tertib administrasi.

## **2. KAJIAN LITERATUR**

### **A. Administrasi**

Secara terminologi, yang disebut administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola (Faried Ali, 2011:19). Selain itu, menurut The Liang Gie (Sahya Anggara, 2012:21) administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Adapun John Pliffer (Sahya Anggara, 2012:21) mengatakan bahwa administrasi dapat dirumuskan sebagai pengorganisasian dan penjurusan sumber-sumber dan bahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya Widjaja (2002:87) menyatakan administrasi sebagai perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan faktor-faktor terjadinya administrasi adalah kelompok orang, kerja sama, dan tujuan.

### **B. Desa**

Menurut Widjaja (1999:19), desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Hal tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa desa adalah sistem keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut R. Bintaro, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan yang lain.

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan Desa adalah Desa atau Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **C. Pengelolaan Administrasi Desa**

Agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, maka pemerintah desa harus didukung oleh administrasi desa yang benar. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa (Nurcholis 2011:135).

Mengelola administrasi desa pada saat ini sangatlah penting. Ada milyaran rupiah yang dikururkan dari pemerintah melalui APBN dan APBD kepada desa. Jika administrasi desa yang dilaksanakan hanya asal-asalan, hal itu akan mengakibatkan kurang tertibnya administrasi di desa-desa.

Sistem administrasi desa yang baik dan benar akan menciptakan tertib administrasi, yaitu dapat menyajikan data dan informasi yang mudah bagi masyarakat dan bagi pemerintah desa dalam membuat kebijakan.

Oleh karena itu, kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 47 tahun 2016 Pasal 3 ayat 2, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dalam rangka:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat.

Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, buku administrasi desa terbagi dalam ruang lingkup yang meliputi:

- a. Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.
- b. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk.
- c. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.
- d. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.

Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum. Administrasi Umum sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Buku Peraturan di Desa;
- b. Buku Keputusan Kepala Desa;
- c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
- d. Buku Aparat Pemerintah Desa;
- e. Buku Tanah Kas Desa;
- f. Buku Tanah di Desa;
- g. Buku Agenda;
- h. Buku Ekspedisi; dan
- i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.

Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di desa, baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk, maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Buku Induk Penduduk;
- b. Buku Mutasi Penduduk Desa;
- c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
- d. Buku Penduduk Sementara; dan
- e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu

Administrasi Keuangan Desa Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dimuat dalam Administrasi Keuangan Desa. Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Buku APB Desa;
- b. Buku Rencana Anggaran Biaya;
- c. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
- d. Buku Kas Umum;
- e. Buku Kas Pembantu; dan
- f. Buku Bank Desa.

Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan. Administrasi Pembangunan meliputi:

- a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
- b. Buku Kegiatan Pembangunan;
- c. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan
- d. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.

### 3. METODE KEGIATAN

Kegiatan yang disusun ini merupakan kegiatan IbM. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan *Participatory Learning And Action* (PLA) atau Proses Belajar dan Praktek secara Partisipatif. PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar (pelatihan, curah pendapat, dan diskusi) tentang topik seperti pengarsipan dalam sekretariat desa, yang setelah itu diikuti dengan aksi atau kegiatan nyata yang relevan dengan materi penguatan

kegiatan tertip administrasi desa (Mardikanto dan Soebiato, 2012:203).

Kegiatan program pengabdian yang dilaksanakan oleh tim di Desa Wari dan Desa Wari Ino bertujuan untuk mendampingi para aparat atau perangkat desa, berkaitan dengan pengelolaan kearsipan, mewujudkan tertib administrasi dalam pemerintahan di Desa Wari dan Desa Wari Ino. Manfaat dari kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap aparatur atau perangkat pemerintahan desa dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan ilmu administrasi bidang kearsipan, menambah pengetahuan dan keterampilan para aparat atau perangkat pemerintahan desa dalam bidang kearsipan.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dengan pendampingan. Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah Aparatur Perangkat Desa Wari dan Wari Ino, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah dan praktik.

Setelah mengikuti penyuluhan terkait dengan teori dan konsep surat-menyurat dan proses pengarsipan di desa, maka nantinya perangkat desa dapat memahami pentingnya pengetahuan dan keterampilan demi terwujudnya tertib administrasi bagi para aparat perangkat desa di Desa Wari dan Wari Ino. Selanjutnya dengan didukung tahap pendampingan maka dipastikan teori yang sudah didapatkan dapat diterapkan sehingga terwujud apa yang menjadi tugas aparat pemerintah dalam melayani masyarakat dengan lebih efektif dan efisien. Dalam proses pendampingan dan praktek, tim akan mempraktekan langsung cara pembuatan surat-menyurat dengan contoh-contoh surat yang jelas. Selain itu, tim juga akan mendampingi serta melakukan praktek pengarsipan yang baik di sekretariat Desa Wari dan Wari Ino.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan administrasi pada Pemerintahan Desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Dengan terbentuknya administrasi pemerintahan desa yang baik, maka akan terbentuk tata pemerintahan yang baik. Pembangunan berjalan lancar dan kehidupan kemasyarakatan akan tertib.

*Tabel 1*  
*Metode Kegiatan Pengabdian*  
*menurut Tahapan Kegiatannya*

No	Tahapan Kegiatan	Metode yang Digunakan	Keterangan
1	Survey, Pengenalan dan Penetapan Wilayah Mitra	Pertemuan dan diskusi	Tim, kepala desa, dan aparatur perangkat desa
2	Sosialisasi Kegiatan	Pertemuan dan Percakapan pengembangan desa	Tim, aparatur perangkat desa
3	Pengorganisasian	Percakapan dan Pertemuan mendesain sistem administrasi Desa Wari dan Desa Wari Ino	Tim, aparatur perangkat desa
4	Pelaksanaan Kegiatan Ceramah	Ceramah konsep sistem administrasi desa.	Tim, aparatur perangkat desa
5	Pendampingan dan Praktek	Mendampingi aparatur perangkat desa dalam pembuatan arsip desa dan administrasi desa	Tim, aparatur perangkat desa
6	Evaluasi Hasil	Mengevaluasi Orientasi Tujuan, yaitu terealisasinya administrasi desa yang baik dan Orientasi kegunaan untuk masyarakat Desa Wari dan Desa Wari Ino	Tim, kepala desa dan aparatur perangkat desa
7	Perbaikan Hasil Evaluasi	Melakukan perbaikan administrasi desa bersama dengan perangkat desa sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan	Tim lbM, kepala desa, dan aparatur perangkat desa

Sistem pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa diarahkan kepada suatu pencatatan data melalui Buku-buku Administrasi Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa, yang telah diubah menjadi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang dicatat secara tertib dan teratur berdasarkan kegiatan-kegiatan setiap harinya sehingga diharapkan akan selalu tersedia data yang diperlukan dalam berbagai hal.



Ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi di Desa Wari dan Wari Ino merupakan salah satu bukti keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Telah menjadi kenyataan bahwa Desa sekarang ini dalam kedudukannya sebagai sumber data dan informasi bagi segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan mempunyai peranan yang sangat menentukan. Keberhasilan pelaksanaan berbagai program pemerintahan dan pembangunan pada semua tingkatan sangat tergantung kepada penyusunan perencanaan yang berpangkal pada data dan informasi yang akurat.

Perangkat Desa Wari dan Wari Ino, Kecamatan Tobelo, masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan administrasi desa. Untuk itu, diadakanlah kegiatan pengabdian dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas perangkat desa. Dalam implementasi kegiatan pengabdian ini, pertama-tama kami melakukan sosialisasi kepada perangkat desa berkaitan dengan kegiatan ini. Sosialisasi diadakan di dua tempat, yaitu Kantor Desa Wari dan Kantor Desa Wari Ino, dan dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya.

Sosialisasi dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini terdiri dari memperkenalkan dan menyampaikan tujuan kegiatan

an pengabdian kepada desa binaan, yaitu untuk Perangkat Desa Wari dan Wari Ino. Selanjutnya, dilakukan kegiatan ceramah kepada perangkat desa dengan materi sistem administrasi desa yang baik, sesuai dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi pemerintahan Desa. Pelaksanaan ceramah kegiatan pengabdian untuk Desa Wari disampaikan oleh Herson Keradjaan, S.IP., MSi., sementara untuk Desa Wari Ino disampaikan oleh Erland Mouw, S.IP., MPA. Materi yang diberikan sesuai dengan pedoman administrasi desa.

Selain itu tim bersama-sama dengan perangkat desa melakukan simulasi cara pengisian buku administrasi desa dan mengklasifikasikan arsip dokumen. Menurut sekretaris desa dan beberapa kepala seksi, pelaksanaan simulasi ini sangat membantu dalam memahami secara langsung cara pengisian buku administrasi desa. Kegiatan seperti ini kiranya dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga perangkat desa dapat memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola administrasi di desa.

Setelah kegiatan simulasi selesai, tim pengabdian menyiapkan buku administrasi desa yang dicetak secara baik, yang diserahkan langsung kepada kepala Desa Wari dan Wari Ino yang digunakan sebagai buku administrasi desa pada tahun 2017.

*Gambar 1*  
*Penyerahan Buku Administrasi*  
*Pemerintah Desa Wari Ino*



*Gambar 2*  
*Penyerahan Buku Administrasi Desa*  
*kepada Kepala Desa Wari*



Tabel 2  
Hasil Kegiatan IbM

Nama Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Capaian	Keterangan
<b>A. ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA</b>				
Model A.1 : Buku Peraturan Desa	Belum ada	Ada	100%	
Model A.2 : Buku Keputusan Kepala Desa	Belum ada	Ada	100%	
Model A.3 : Buku Data Inventarisasi Kekayaan Desa	Belum ada	Ada	100%	
Model A.4 : Buku Aparat Pemerintah Desa	Belum ada	Ada	100%	
Model A.5 : Buku Data Tanah Kas Desa	Belum ada	Ada	100%	
Model A.6 : Buku Data Tanah Desa	Belum ada	Ada	100%	
<b>B. ADMINISTRASI PENDUDUK</b>				
Model B.1 : Buku Data Induk Penduduk	Ada	Ada	100%	
Model B.2 : Buku Data Mutasi Penduduk	Belum ada	Ada	100%	
Model B.3 : Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk	Belum ada	Ada	100%	
Model B.4 : Buku Data Penduduk Sementara	Belum ada	Ada	100%	
Model B.5 : Buku Data Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu keluarga		Ada	100%	
<b>C. BUKU ADMINISTRASI KEUANGAN DESA</b>				
Model C.1 : Buku APBDes	Belum ada	Ada	100%	
Model C.2 : Buku Rencana Anggaran Biaya	Belum ada	Ada	100%	
Model C.3 : Buku Kas Pembantu Kegiatan	Belum ada	Ada	100%	
Model C.4 : Buku Kas Umum	Belum ada	Ada	100%	
Model C.5 : Buku Kas Pembantu	Belum ada	Ada	100%	
Model C.6 : Buku bank desa	Belum ada	Ada	100%	
<b>D. BUKU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>				
Model D.1 : Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	Belum ada	Ada	100%	
Model D.2 : Buku Kegiatan Pembangunan	Belum ada	Ada	100%	
Model D.3 : Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan	Belum ada	Ada	100%	
Model D.4 : Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat	Belum ada	Ada	100%	

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian tentang pengelolaan administrasi desa di Desa Wari dan Wari Ino, mulai dari awal pelaksanaan yakni survey penetapan desa mitra, sosialisasi kegiatan, pelaksanaan kegiatan ceramah, sampai pada pembuatan buku administrasi desa, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian seperti ini sangat dinantikan oleh perangkat desa dalam upaya menata administrasi desa yang selama ini belum lengkap sistem administrasinya. Perangkat desa yang menjadi target sasaran kegiatan pengabdian ini sangat antusias mengikuti kegiatan penyampaian materi melalui ceramah dan diskusi, serta simulasi pengisian buku administrasi desa. Menurut perangkat desa Desa

Wari dan Wari Ino, kegiatan seperti ini sangat berguna bagi perbaikan administrasi desa dan lebih penting yaitu perangkat desa dapat memahami sistem administrasi desa yang baik dan benar. Mereka sangat mengharapkan kegiatan seperti ini bisa dilakukan lagi di Desa Wari dan Wari Ino.

Setelah melaksanakan kegiatan pengabdian, dapat diketahui betapa bermanfaatnya hal tersebut bagi perangkat desa Desa Wari dan Wari Ino. Oleh karena itu, disampaikan saran agar kegiatan pendampingan bagi perangkat desa dilakukan secara berkelanjutan sehingga bisa memberikan manfaat bagi Desa Wari dan Wari Ino supaya memiliki tata kelola pemerintahan desa yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi: Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bintari, R. 1989. *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardikanto, T dan Soebiato, P. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Liang Gie, The. 1997. *Kamus Administrasi*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Syafie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Widjaja, AW. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

